

ABSTRAK

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin

Kemiskinan merupakan masalah besar utamanya bagi negara – negara berkembang. Masalah ini setiap tahunnya menjadi sorotan serius karena penduduk miskin yang besar tentu akan menjadi beban bagi kemajuan sebuah negara. Kemiskinan sekarang ini tidak lagi hanya berada di tingkat pedesaan namun sudah menjamur ke wilayah perkotaan. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Semarang, pada tahun 2015 jumlah warga miskin yang ada di Kota Semarang sebanyak 114.939 Kepala Keluarga atau 367.848 jiwa. Melihat kondisi ini Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu program dari kebijakan tersebut adalah pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin.

Kartu Identitas Miskin atau sering disingkat KIM digunakan untuk mengidentifikasi warga miskin yang ada di Kota Semarang. KIM digunakan sebagai acuan bagi seluruh program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Proses pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang harus tertuju kepada masyarakat penerima Kartu Identitas Miskin. Harapannya program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang akan tepat sasaran.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah penelitian pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin. Implementasi Kartu Identitas Miskin dimulai dengan proses verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan sudah dimulai pertama kali pada tahun 2009. Selanjutnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan mengacu pada data warga miskin Kota Semarang yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis meneliti pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai contoh.

Dalam implementasi program Kartu Identitas Miskin di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Semarang peneliti menemukan bahwa belum sepenuhnya SKPD mengacu kepada masyarakat penerima KIM dalam melaksanakan program. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota yang bisa diakses hanya dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Proses sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat juga membuat banyak masyarakat belum mengerti tentang prosedur dan pemanfaatan KIM. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa dalam proses pendataan warga miskin belum sepenuhnya valid dan akurat. Masih terjadi subjektivitas petugas pendata sehingga data warga miskin Kota Semarang yang dihasilkan belum sepenuhnya tepat sasaran. Perlu upaya pemerintah untuk memperbaiki program Kartu Identitas Miskin ini dimulai dari proses verifikasi dan identifikasi warga miskin hingga pengawasan yang ketat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan database warga miskin dan bisa didapatkan data warga miskin Kota Semarang yang valid dan akurat serta program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Kata kunci : Kemiskinan, Kartu Identitas Miskin, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Semarang City's Poverty Reduction Policy through Kartu Identitas Miskin

Poverty is the main problem for developing countries. Every year, poverty is seriously highlighted since it causes hindrance for countries to advance. Today, not only rural areas have the problem, but urban areas or big cities as well. Semarang is not excluded. Based on data released by BAPPEDA Semarang, in the year 2015 the number of the poor in Semarang is 114.939 families or 367.848 individuals. This urges Semarang city government to issue a poverty reduction policy. One of the programs of the policy is collecting data of the poor and tagging them by giving Kartu Identitas Miskin, an identity card only for the poor.

Kartu Identitas Miskin or KIM to identify the poor is used as reference for all poverty reduction programs in Semarang. Poverty reduction program in Semarang should base its execution to the collected data. This expects the program to reduce poverty is right on the target.

The focus of this research is the implementation of the poverty reduction policies in Semarang city through KIM. The program execution is started with identify and verify the data of the poor every two years. This has been held in 2009 and continuing. The next step is executing the program which is planned based on the data. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) is the executant. Author conducts research on the implementation process of poverty reduction programs done by Department of Health and Department of Education in Semarang as samples.

Author finds that SKPD doesn't fully refer to KIM beneficiaries in implementing the programs. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota, a health insurance for Semarang citizen provided by the government, can only be accessed with Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), a certificate for people at economic disadvantage, even for people whom already have KIM. Lack of socialization process to the citizen makes a lot of information biases about the procedure and how to use KIM. Besides, author also finds that the enumeration of the data is not entirely valid and accurate. The officers doing enumeration still use their own subjectivity in registering the beneficiaries. Semarang government needs to do more efforts to improve KIM program, started with giving more control in identification and verification process. The validity of the collected data will lead the implementation right on the target.

Keywords : poverty, Kartu Identitas Miskin, policy implementation

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah besar utamanya bagi negara – negara berkembang. Masalah ini setiap tahunnya menjadi sorotan serius karena penduduk miskin yang besar tentu akan menjadi beban bagi kemajuan sebuah negara. Menurut Mutaqien (2006:6) kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan material seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik. Permasalahan kemiskinan ini harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Indonesia sebagai sebuah negara berkembang pun sudah bertahun – tahun diliputi masalah kemiskinan yang cukup besar. Menurut data dari BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25 persen atau 28,28 juta jiwa. Jumlah yang cukup besar dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2015 (<http://www.bps.go.id> ,diakses tanggal 30 Desember 2015, pukul 08.20)

Kemiskinan selamanya hanya akan menjadi lingkaran yang membelenggu ketika tidak diselesaikan dari akar permasalahannya. Seseorang yang lahir dari keluarga miskin tentu akan kesulitan dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Pendidikan yang rendah tersebut akan menyulitkan dalam persaingan mendapat pekerjaan yang layak karena rendahnya sumberdaya manusia. Hanya pekerjaan – pekerjaan yang memiliki pendapatan yang rendah yang mampu diakses oleh orang yang memiliki pendidikan rendah. Sehingga pendapatan tersebut belum mampu mengeluarkannya dari kemiskinan. Kondisi tersebut akan terus berulang karena akan terlahir kembali anak – anak dari keluarga miskin.

Proses pengentasan kemiskinan kemudian dilakukan secara menyeluruh sampai pada tingkatan – tingkatan daerah dalam pemerintahan, tidak terkecuali Kota Semarang. Adanya sistem otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memberikan perannya dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, tidak terkecuali untuk mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kota Semarang, pada tahun 2015 jumlah warga miskin yang ada di Kota Semarang sebanyak 114.939 Kepala Keluarga atau 367.848 jiwa dan jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050 / 680 / 2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang Penetapan Database Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2015 : Laporan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang).

Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Kartu Identitas Miskin (KIM). Kartu tersebut merupakan penanda warga miskin yang dapat digunakan untuk mengakses layanan – layanan penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan adanya penanda tersebut maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki program penanggulangan kemiskinan wajib untuk mengacu pada warga yang terdaftar dalam Kartu Identitas Miskin tersebut.

Kartu Identitas Miskin berguna untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas dalam penanggulangan kemiskinan. KIM tersebut dimaksudkan bagi warga Kota Semarang yang telah masuk dalam database warga miskin sesuai Keputusan Walikota Semarang. Penerima KIM dapat menggunakan kartu tersebut untuk mengakses layanan kepada warga miskin khususnya dalam bidang pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan dan Permodalan Warga Miskin.

Permasalahan justru seringkali muncul pada tahapan identifikasi warga miskin untuk pemberian Kartu Identitas Miskin. Ini terjadi hampir di semua program penanggulangan kemiskinan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahan yang terjadi adalah ada warga yang benar miskin namun tidak tercatat sebagai warga miskin dan pada sisi lain ada warga yang termasuk golongan mampu justru masuk dalam data warga miskin. Seringkali kondisi tersebut menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Cresswell,2013:4-5). Penelitian ini dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang sebagai instansi yang melakukan pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, serta masyarakat yang menerima Kartu Identitas Miskin. Situs penelitian tersebut dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan faktor kuwat - kemampuan, uang, waktu, analisis, dan tenaga.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan oleh narasumber Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan hasil wawancara intensif dengan

masyarakat penerima Kartu Identitas Miskin. Serta melalui data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, baik dari buku, tinjauan pustaka, dokumen-dokumen, jurnal, buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah – tengah Pulau Jawa dimana memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, Kota Semarang dilewati oleh Jalur Pantura yang merupakan jalan nasional trans jawa pada sisi utara. Selain dilalui oleh jalan nasional, Kota Semarang juga dilintasi jalur kereta api lintas utara, yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. Terdapat dua stasiun besar yang ada di Kota Semarang yaitu Stasiun Tawang yang melayani kereta api kelas bisnis dan eksekutif, juga Stasiun Poncol yang melayani kereta api kelas ekonomi. Selain transportasi darat, Kota Semarang juga dilengkapi transportasi laut dan udara. Bandara Ahmad Yani Semarang merupakan bandara internasional yang terus berkembang untuk melayani kebutuhan masyarakat pengguna transportasi udara. Untuk transportasi laut terdapat pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola oleh PT Pelindo III yang melayani angkutan penumpang dan angkutan barang (*cargo*). Posisi ini menjadikan Kota Semarang memiliki potensi besar secara perekonomian karena merupakan salah satu jalur perdagangan di Pulau Jawa.

Seiring dengan perkembangan kota, sesuai dengan visi dan misinya Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa (bappeda.semarangkota.go.id, diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 10.30 WIB). Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan – jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Pada kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza dan Mall Ciputra, serta PKL – PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan dan jasa juga terdapat di sepanjang jalan Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh – oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jalan Gajahmada. Kawasan perdagangan dan Jasa juga terdapat di Jalan Pemuda dengan adanya DP Mall, Paragon City dan Sri Ratu, Jalan Pemuda juga merupakan kawasan pusat pemerintahan Kota Semarang. Belum lagi adanya pasar – pasar tradisional seperti Pasar Johar yang menjadi ikon Kota Semarang juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Kartu Identitas Miskin

Proses implementasi Kartu Identitas Miskin diawali dengan proses identifikasi. Pada saat proses identifikasi, yang memiliki wewenang melaksanakan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Proses identifikasi ini meliputi pendataan dan penandaan warga miskin. Selain itu Bappeda Kota Semarang juga merupakan kordinator untuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang. Selanjutnya untuk proses pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD lainnya sesuai tugasnya masing – masing. Sesuai dengan pernyataan Bapak Yohanes Adhi Nugroho, ST, MT:

“Jelas yang terlibat adalah eksekutif dan legislatif. Legislatif itu DPRD Kota Semarang sedangkan eksekutifnya adalah 26 SKPD yang tergabung dalam TKPKD. Nah perannya kalau yang eksekutif itu melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai tupoksi masing – masing bidang. Kalau bappeda walaupun tugasnya perencanaan, selain perencanaan penganggaran juga mendapat amanah dari perda itu untuk mendata. Selain itu fungsi Bappeda adalah sebagai kordinator TKPKD. Jadi 26 SKPD tersebut dikordinatori oleh Bappeda. Salah satu kesulitannya disini, mengkoordinasikan banyak instansi itu bukan hal yang mudah, kami sering sekali mengalami miss komunikasi dengan instansi – instansi lain baik itu masalah konsep ataupun teknis pelaksanaan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Yohane Adhi Nugroho, Tanggal 24 Februari 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin melibatkan banyak sekali pihak. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar masing – masing pihak tersebut agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan sinergis dan tidak saling tumpang tindih.

Pelaksanaan program Kartu Identitas Miskin memiliki tujuan untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2010 - 2015 bahwa setiap tahun jumlah penduduk miskin di Kota Semarang harus berkurang 2%, maka Kartu Identitas Miskin juga berfungsi sebagai penanda untuk warga miskin. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yohanes Adhi Nugroho ST, MT yang mengatakan bahwa:

“Jelas fungsinya itu tanda, jadi penandaan warga miskin yang masuk database warga miskin. Ibaratnya begini, kalau kamu punya KIM itu untuk memotong rantai SKTM. Kalau SKTM kan harus mengurus mulai RT RW, kelurahan. Kalau KIM bisa langsung digunakan sesuai kebutuhannya. SKTM kan butuh waktu lama nah kalau KIM bisa cepat

itu. Yang kedua memudahkan eksekutif untuk melaksanakan kegiatannya ke subyek yang tepat sasaran. Tujuan utamanya untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Target RPJMD 2010 - 2015 kan penurunan 2% per tahun. Untuk menghitung itu maka dibuatlah penandaan untuk warga miskin agar terkontrol setiap tahunnya.”(Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Adhi Nugroho, Tanggal 24 Februari 2016)

Sesuai dengan tujuan tersebut, maka pendataan warga miskin pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 kemudian secara berkala setiap dua tahun sekali dilaksanakan pendataan hingga yang terakhir yaitu pada tahun 2015. Pada tahun 2009 jumlah warga miskin di Kota Semarang yaitu 398.009 jiwa dengan jumlah total penduduk Kota Semarang 1.506.924 jiwa maka tingkat kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2009 adalah 26,41%. Kemudian pada pendataan warga miskin kedua pada tahun 2011 diperoleh hasil jumlah penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 448.398 jiwa dengan jumlah total penduduk 1.545.248 jiwa. Dengan hasil tersebut tingkat kemiskinan di Kota Semarang mengalami peningkatan yaitu menjadi 29,04%. Pada pendataan warga miskin Kota Semarang yang ketiga pada tahun 2013 diperoleh hasil jumlah warga miskin Kota Semarang sebesar 373.978 jiwa dengan prosentase tingkat kemiskinan sebesar 21,49%. Selanjutnya dilaksanakan lagi pendataan warga miskin Kota Semarang yang keempat pada tahun 2015 yang menghasilkan database warga Miskin Kota Semarang sebesar 367.848 jiwa dengan jumlah total penduduk 1.773.905 jiwa atau dengan prosentase sebesar 20,73%. Selama kurang lebih lima tahun jumlah penduduk miskin di Kota Semarang mengalami penurunan sebesar 5,68%. Jika dihitung rata – rata selama lima tahun maka setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Kota Semarang berkurang sebesar 1,13%. Hasil tersebut masih belum sesuai dengan amanah RPJMD Kota Semarang 2010 – 2015 yang mengamanahkan penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 2% per tahun.

Selain sebagai tanda fungsi Kartu Identitas Miskin juga dapat digunakan untuk mengakses program – program penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Seperti contoh program jaminan kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Bagi warga penerima Kartu Identitas Miskin tetapi tidak termasuk dalam penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat yang diberikan oleh pemerintah pusat maka akan masuk ke dalam penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Harmoko selaku Kepala seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu:

“Tujuannya untuk menjamin kesehatan seluruh warga Kota Semarang. Jadi sekarang tidak perlu takut lagi untuk berobat. Kami menjamin biaya berobatnya mulai dari pelayanan dasar sampai pelayanan lanjut. Pada

prinsipnya semua harus tercover jaminan kesehatan. Baik itu melalui jamkesmas atau pun jamkesmaskot, tetapi saat ini keduanya sedang dalam proses kita transformasikan ke BPJS Kesehatan. Jadi nantinya yang mengcover BPJS Kesehatan. Yang jelas tujuan utamanya adalah menjamin kesehatan seluruh warga Kota Semarang.”(Hasil wawancara dengan Bapak Harmoko, tanggal 2 Maret 2016)

Dari wawancara tersebut dapat terlihat bahwa Kartu Identitas Miskin memiliki tujuan untuk menjamin kesehatan warga Kota Semarang tanpa terkecuali. Bagi yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan pemerintah pusat maka akan dimasukkan dalam jaminan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.

Manfaat Kartu Identitas Miskin secara nyata juga sudah dirasakan oleh masyarakat, banyak masyarakat yang sekarang memanfaatkan kesempatan untuk berobat secara gratis utamanya. Mereka merasa terbantu oleh program dari Pemerintah Kota Semarang ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Munardi, salah satu penerima Kartu Identitas Miskin di Kelurahan Mugasari Kecamatan Semarang Selatan yang menyampaikan

“ya saya memanfaatkan untuk berobat kalau sakit seperti ini, saya terbantu sekali sejak ada berobat gratis ini. Kalau dulu waktu sakit paling saya obati sendiri di rumah, atau ke tukang pijit. Takut kalau mau berobat mahal. Kalau sekarang sudah terbantu sekali untuk berobat, tidak perlu khawatir lagi.”(Hasil wawancara dengan Bapak Munardi, tanggal 2 Maret 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kartu Identitas Miskin secara langsung sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat tersebut sudah mampu merubah pola hidup masyarakat yang sebelumnya enggan berobat secara medis karena takut dengan biaya yang mahal, sekarang ini masyarakat sudah bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang gratis.

Dalam kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin, anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Kota Semarang. Dari proses penganggaran ini bisa dilihat komitmen dari pemangku kebijakan baik itu legislatif atau pun eksekutif dalam menyusun anggaran. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yohanes Adhi Nugroho ST, MT yang mengatakan:

“Sumber anggaran dari APBD Kota Semarang.”

Pada APBD Kota Semarang tahun 2015 anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan cukup besar. Secara keseluruhan total anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 183.445.810.100,00. Anggaran tersebut digunakan oleh 23 SKPD yang memiliki program untuk penanggulangan kemiskinan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kartu Identitas Miskin

Faktor Pendukung

a. Payung hukum yang jelas

Dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kota Semarang tentang penanggulangan kemiskinan, maka sudah jelas payung hukum yang digunakan sebagai landasan dan koridor dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang tujuannya adalah mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Kartu Identitas Miskin ini yang kemudian menjadi implementasi dari peraturan daerah tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Semarang No 4 Tahun 2008 yaitu mengenai identifikasi warga miskin.

b. Komitmen eksekutif dan legislatif

Suksesnya program Kartu Identitas Miskin sampai saat ini tidak lepas dari komitmen eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melalui SKPD yang tergabung dalam Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan legislatif dalam hal ini DPRD Kota Semarang yang mendukung dalam hal penganggaran. Kepatuhan terhadap kebijakan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan merupakan suatu bentuk komitmen dari pemangku kebijakan di Kota Semarang untuk semakin mempercepat proses penanggulangan kemiskinan.

c. Anggaran

Anggaran merupakan faktor yang sangat mendukung suksesnya program Kartu Identitas Miskin. Tentu sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak memiliki anggaran yang mencukupi. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang selalu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bidang penanggulangan kemiskinan pada APBD Kota Semarang tiap tahunnya.

Faktor penghambat

a. Kordinasi

Sama seperti hambatan kebijakan – kebijakan yang ada di Indonesia, masalah kordinasi juga masih menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Miskin yang ada di Kota Semarang. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang terlibat dalam kebijakan ini. Kebijakan Kartu Identitas Miskin dalam pelaksanaannya melibatkan 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Kordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Dengan keterlibatan banyak pihak tersebut sering terjadi salah kordinasi antar pihak – pihak yang berkepentingan.

b. Mental masyarakat

Mental masyarakat yang seperti itu juga dimiliki oleh warga Kota Semarang. Saat dilakukan pendataan warga miskin banyak warga Kota Semarang yang sebenarnya masuk dalam golongan warga yang bukan miskin tetapi minta untuk diusulkan masuk dalam database warga miskin Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan jumlah penduduk miskin Kota Semarang menjadi sangat besar. Saat dilakukan monitoring dan evaluasi akhirnya banyak ditemukan masyarakat penerima Kartu Identitas Miskin yang tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan sehingga kartu tersebut harus ditarik dan nama yang bersangkutan diusulkan untuk dicoret dari database warga miskin Kota Semarang.

c. Penduduk sub urban

Penduduk sub urban merupakan warga yang tinggal disekitar wilayah Kota Semarang namun tidak masuk wilayah administrasi Kota Semarang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pada saat menjelang pendataan warga miskin banyak warga di wilayah tersebut membuat KTP warga Semarang. Hal ini bisa terjadi karena ulah dari oknum – oknum ditingkat RT dan RW yang mengusulkan data warga miskin. Mereka biasanya memanfaatkan hal tersebut guna menggunakan kuota 20% peserta didik berasal dari kalangan tidak mampu agar dapat menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah yang ada di Kota Semarang.

d. Subjektifitas petugas pendata

Petugas pendata berasal dari RT dan RW yang membuat usulan warga miskin yang akan dimasukkan dalam database warga miskin. Saat memberikan usulan ini lah banyak terjadi penyimpangan karena subjektifitas dari petugas pendata tersebut. Banyak terjadi kasus warga yang termasuk golongan mampu dimasukkan ke dalam database warga miskin karena memiliki kedekatan emosional dengan petugas pendata, sedangkan di sisi lain warga yang harusnya masuk database justru tidak tercatat oleh petugas pendata.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin pada tahun 2016 ini, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kartu Identitas Miskin diperuntukkan untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kota Semarang menjadikan masalah kemiskinan menjadi program prioritas yang harus segera diselesaikan dan dituangkan dalam sapta program Kota Semarang. Jumlah penduduk miskin yang tinggi tentu akan menjadi beban tersendiri dalam sebuah pembangunan kota. Untuk itu masalah kemiskinan perlu diselesaikan dengan segera. Untuk melakukan percepatan proses penanggulangan kemiskinan tersebut Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Program penerapan Kartu Identitas Miskin merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut.

Keberhasilan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin saat ini belum semuanya optimal. Dilihat berdasarkan tujuan dan fungsi kebijakan tersebut ada beberapa tujuan yang belum tercapai dan ada beberapa fungsi yang sudah tercapai. Beberapa fungsi Kartu Identitas Miskin yang sudah tercapai yaitu:

1. Tersedianya database warga miskin Kota Semarang yang akan menjadi acuan setiap program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.
2. Memberikan akses kepada warga miskin Kota Semarang untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan masyarakat kota.
3. Memberikan akses kepada warga miskin Kota Semarang untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal sampai 12 tahun.
4. Program – program lain yang dimiliki oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih sinergis dan sesuai sasaran karena mengacu kepada data yang sama yaitu database warga miskin Kota Semarang.

Tujuan Kartu Identitas Miskin yang belum tercapai dengan baik adalah target penurunan jumlah warga miskin Kota Semarang sebesar 2% per tahun sesuai amanah RPJMD Kota Semarang 2010 – 2015. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penurunan rata – rata jumlah penduduk miskin Kota Semarang hanya 1,13%. Tujuan Kartu Identitas Miskin untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan belum dapat tercapai dengan baik karena masih kurang dari target yang telah ditetapkan. Selain itu masih ada SKPD yang belum sepenuhnya mengacu kepada masyarakat penerima Kartu Identitas Miskin dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dimiliki.